

SOAL ASESSMEN SUMATIF

Instrumen tes sumatif

Nama :
Kelas / Semester : IX / 1 (Satu)
Hari / Tanggal :
Waktu :
Materi : Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pilihlah salah satu jawaban dari A, B, C, atau D yang paling benar!

1. Berikut ini termasuk kewajiban warga negara yang tercantum dalam UUD 1945 adalah....
 - a. mendapat pendidikan dan pengajaran.
 - b. ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
 - c. mendapat penghidupan yang layak
 - d. menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan
2. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang karena....
 - a. hak dan kewajiban bersamaan di tuangkan dalam aturan
 - b. tidak ada hak yang mungkin ada tanpa kewajiban dalam membantu hak menjadi ada
 - c. hak menjamin keberlangsungan hidup sedangkan kewajiban hanya dilakukan jika perlu saja
 - d. pelaksanaan hak dan kewajiban dilaksanakan sebagai aturan dari pemerintah
3. Contoh keseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan yang kalian terima dan lakukan adalah
 - a. mendapat layanan pendidikan yang sama di sekolah dan belajar dengan sungguh-sungguh.
 - b. mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum dan menaati setiap paerundang-undangan yang berlaku.
 - c. mendapatkan kesejahteraan, kesempatan dalam bekerja dan berusaha serta berusaha mencintai produk dalam negeri.
 - d. mendapatkan jaminan keamanan dan kenyamanan serta melaksanakan upaya bela negara sesuai dengan perannya sebagai peserta didik
4. Contoh keseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi yang kalian terima dan lakukan adalah
 - a. mendapat layanan pendidikan yang sama di sekolah dan belajar dengan sungguh-sungguh
 - b. mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum dan menaati setiap paerundang-undangan yang berlaku



- 
- c. mendapatkan kesejahteraan, kesempatan dalam bekerja dan berusaha serta mencintai produk dalam negeri
 - d. mendapatkan jaminan keamanan dan kenyamanan serta melaksanakan upaya bela negara sesuai dengan profesi sebagai peserta didik
5. Contoh upaya kalian dalam menghormati dan menghargai hak-hak orang lain adalah
- a. mengemukakan pendapat saat diskusi di kelas tanpa menghiraukan pendapat teman kita, karena kebebasan berpendapat diatur dalam UUD 1945
 - b. mendengarkan pendapat teman kita dalam berdiskusi dan menerima masukan dari teman kita apabila pendapat kita mendapat tanggapan.
 - c. mengerjakan tugas sekolah secara individu dan tidak memberi bantuan kepada teman
 - d. melaksanakan piket sekolah setiap hari karena merupakan kewajiban.

URAIAN

Untuk menjawab soal nomor 6 dan 7 kalian perlu membaca teks berita berikut ini !

Sedikitnya 3 Provinsi Gratiskan Sekolah untuk Siswa SMA

Pada Tahun 2018, dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, ada beberapa daerah yang menggratiskan SPP untuk siswa-siswi SMA sederajat. Di antaranya Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Banten dan Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun mendatang untuk ajaran 2019/2020, akan menganggarkan Rp 904, 18 Miliar.

Besaran uang yang mendekati angka satu triliun tersebut, akan digunakan untuk biaya SPP maupun seragam sekolah bagi siswa SMA/SMK, baik negeri maupun swasta. Berdasar hasil kajian yang sudah dilakukan DPRD Provinsi dan Dinas Pendidikan Jawa Timur, diproyeksikan untuk menyubsidi SPP 1.280.545 siswa.

(Sumber : Siedoo.com/M Nur Ali)

<https://siedoo.com/berita-11837-sedikitnya-3-provinsi-gratiskan-sekolah-untuk-siswa-sma-mana-saja/>

Berdasarkan teks berita di atas, jawablah 2 (dua) pertanyaan berikut!

- 6. Tentukan siapa saja yang menerima hak dan pihak mana yang sudah menunaikan kewajiban!
- 7. Menurut kalian mengapa pemerintah Provinsi Jawa Timur merasa perlu menganggarkan Rp. 904,19 Miliar untuk biaya Pendidikan di daerahnya?



Untuk menjawab soal nomor 8, 9 dan 10 kalian perlu membaca petikan teks berita berikut ini!

Di Indonesia masih ditemukan anak berkebutuhan khusus dan anak penyandang disabilitas yang ditolak di sekolah umum maupun sekolah inklusi. Berbagai permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi antara lain karena tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang belum ramah anak, guru pendamping yang kurang, pembiayaan yang mahal untuk penyediaan guru pendamping, anak penyandang disabilitas rentan mendapat bully dan lainnya.

Anak disabilitas di Indonesia menurut data tahun 2016 sebesar 12,5 %. Banyaknya anak-anak down syndrome yang tidak sekolah menjadi perhatian kita semua. 10,8% dari total tersebut masih bisa dididik tetapi 1,7% dari anak-anak ini tidak bisa dilatih atau dididik. Pemerintah saat ini concern terhadap masalah disabilitas ini. Salah satunya dengan melatih keluarga agar dapat turut melatih anak-anak yang terkena down syndrome.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif bagi penyandang cacat, pada tahun 2002 pemerintah secara resmi mulai melakukan proyek ujicoba di 9 provinsi yang memiliki pusat sumber dan sejak saat itu lebih dari 1500 siswa berkelainan telah bersekolah di sekolah reguler, dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 6.000 siswa atau 5,11% dari seluruh jumlah anak berkebutuhan khusus. Sedangkan pada tahun 2007 meningkat menjadi 7,5% atau 15.181 siswa yang tersebar pada 796 sekolah inklusif yang terdiri dari 17 TK, 648 SD, 75 SLTP, dan 56 SLTA.

Sumber : <https://www.liputan6.com/news/read/3653589/ini-fokus-pemerintah-dalam-pemenuhan-hak-anak-berkebutuhan-khusus>

Pada teks di atas tampak upaya pemerintah dalam memenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus secara umum di Indonesia. Berdasarkan teks tersebut jawablah pertanyaan berikut ini!

8. Berdasarkan Teks diatas bagaimana Upaya pemerintah dalam menghadapi masalah keberadaan anak-anak disabilitas atau anak berkebutuhan khusus?
9. Berapa persen (%) kah peningkatan proyek ujicoba implementasi pendidikan inklusif bagi penyandang cacat yang dilakukan di 9 provinsi dari tahun 2002 sampai tahun 2007?
10. Berapakah jumlah peningkatan siswa berkebutuhan khusus pada proyek ujicoba implementasi pendidikan inklusif bagi penyandang cacat yang dilakukan di 9 provinsi dari tahun 2002 sampai tahun 2007?





Puskörjar
Pusat Kurikulum dan Pembelajaran

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
PUSAT KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN